



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moeh. Adam

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Sugiyartanto

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
SUGIYARTANTO

Jakarta, Juni 2020

Pihak Pertama

  
MOEH. ADAM



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Sasaran Kegiatan:</b> Peningkatan kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya.	5.381 Orang	4.021 Orang
	<b>Output:</b>			
1.	Layanan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	5.360 Orang	4.000 Orang
2.	Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pelatihan	1. Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	2 Dokumen	2 Dokumen
3.	Layanan Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional yang dievaluasi penugasannya, pembinaannya dan pengembangannya	720 Orang	720 Orang
4.	Layanan Pendidikan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	21 Orang	21 Orang
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 2. Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	1 Layanan	1 Layanan
6.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	1 Layanan
7.	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

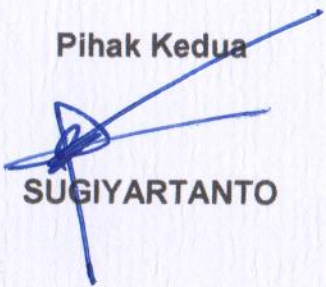
**Kegiatan:**

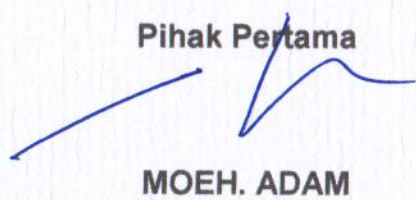
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  
 Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

- Satuan Kerja : Rp. 32.542.563.000,-  
 - Pelatihan Balai Diklat PUPR Wil. I-IX : Rp. 62.242.301.000,-

**Anggaran Awal:** Rp. 31.093.663.000,-  
**Anggaran Revisi:** Rp. 39.962.921.000,-

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua  
  
**SUGIYARTANTO**

Pihak Pertama  
  
**MOEH. ADAM**





REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moeh. Adam

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Sugiyartanto

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

SUGIYARTANTO

Jakarta, Juni 2020

Pihak Pertama

MOEH. ADAM



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Sasaran Kegiatan:</b> Peningkatan kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya.	5.381 Orang	4.021 Orang
	<b>Output:</b>			
1.	Layanan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	5.360 Orang	4.000 Orang
2.	Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pelatihan	1. Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	2 Dokumen	2 Dokumen
3.	Layanan Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional yang dievaluasi penugasannya, pembinaannya dan pengembangannya	720 Orang	720 Orang
4.	Layanan Pendidikan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	21 Orang	21 Orang
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 2. Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	1 Layanan	1 Layanan
6.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	1 Layanan
7.	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

**Kegiatan:**

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  
 Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

- Satuan Kerja : Rp. 32.542.563.000,-  
 - Pelatihan Balai Diklat PUPR Wil. I-IX : Rp. 62.242.301.000,-

**Anggaran Awal:**

**Anggaran Revisi:**

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua

SUGIYARTANTO

Pihak Pertama

MOEH. ADAM